

UPAYA PEMERINTAH RI MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA

Sri Kasnelly¹ Muhammad Said²

Dosen¹ dan Mahasiswi² Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

email: 1srikasnellykasmijan@gmail.com, 2fs07072002@gmail.com,

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah RI untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat betapa pentingnya pendapatan negara untuk penguatan ekonomi dan pembangunan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, yang menganalisis kesenjangan dan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Hasil telaah diperoleh yaitu pemerintah melakukan terobosan kebijakan seperti melanjutkan penguatan kualitas SDM dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi fiskal, baik secara administrasi maupun regulasi.

Kata kunci: *Pendapatan negara, meningkat*

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan ekonomi nasional merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, dengan semakin berkembangnya pembangunan ekonomi di dalam suatu negara maka dapat dikatakan bahwa semakin besar juga pendapatan nasional negara tersebut. Dan kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari dengan melihat pertumbuhan pendapatannya.¹

Indonesia merupakan negara berkembang, namun memiliki permasalahan yang begitu besar yaitu kesenjangan dan ketimpangan dalam ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat, yaitu pada pendapatan. Disparitas pendapatan

¹ Firdaus, *Analisis Pendapatan, Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Nasional*, Jurnal Plano Madani Vol. I, No. 1, 2022, hlm. 63

UPAYA PEMERINTAH RI MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA

merupakan aspek yang umum terjadi pada suatu negara dalam konteks distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, sedang dan rendah serta masalah pembangunan ekonomi antar daerah yang tidak merata. Namun ketimpangan pendapatan ini akan menimbulkan perekonomian yang tidak maksimal, kebersamaan antar sesama masyarakat akan menurun, yang lebih buruknya lagi akan menimbulkan kriminalitas.²

Salah satu faktor yang mengakibatkan tingkat ketimpangan pendapatan adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah dapat difungsikan untuk meningkatkan pembangunan fasilitas masyarakat dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan penerimaan tenaga kerja.³ Bhima Yudhistira memberikan gambaran mengenai belanja negara pada tahun 2022 yaitu mencapai 90% dari target 100%, dengan 90% tersebut diperkirakan masih belum cukup untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi.⁴

Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan juga memberikan gambaran tentang pendapatan nasional pada tahun 2023 yaitu pendapatan negara akan mencapai Rp. 2.443,6 triliun, angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu Rp. 2.436,9 triliun.⁵ Melihat data tersebut ada beberapa unsur untuk meningkatkan pendapatan nasional di Indonesia sehingga masyarakat dapat merasakan pembangunan yang merata. Salah satu keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu dengan pembangunan yang tinggi dan pemerataan pembangunan yang diutamakan, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka penulis akan meneliti tentang “Upaya Meningkatkan Pendapatan Nasional Indonesia”

² Sri Wahyuni, Devi Andriyani, *Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Aceh*, Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 39.

³ Hikmah Nuraini, Dkk, *Analisis Faktor Penyebab Ketimpangan Pendataan Pada Lima Provinsi Tertimpang di Indonesia*, Jurnal Manajemen Akuntansi. Vol. 18, No. 1, 2022, hlm. 55.

⁴ Didalam <https://nasional.kontan.co.id> Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2022.

⁵ Di dalam <https://kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 7 desember 2022.

UPAYA PEMERINTAH RI MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA

B. KAJIAN TEORI

Pendapatan nasional merupakan jumlah keseluruhan pendapatan yang didapat oleh masyarakat atau bisa disebut pelaku ekonomi yang menduduki suatu negara dalam waktu tertentu. Dengan demikian pendapatan nasional adalah hasil produksi yang didapat oleh masyarakat dalam satu tahun, dengan kemudian hasilnya akan didata dan dihitung sesuai apa yang didapat selama satu tahun.⁶

Pendapatan negara memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara, yaitu membandingkan kegiatan ekonomi di dalam masyarakat selama periode yang ditentukan, dan memutuskan bahkan menyusun suatu kegiatan yang dipandang memiliki kontribusi di dalam perekonomian suatu negara, contohnya: pada sektor pertanian, industri dan hal-hal lain sebagainya.⁷

Untuk mengetahui pendapatan suatu negara dapat dilakukan melalui beberapa cara/metode yang dilakukan yaitu dengan metode pendapatan, produksi, dan pengeluaran. Didalam ketiga metode tersebut dapat menjadi patokan untuk menghitung suatu pendapatan disuatu negara.

Metode pendapatan ini dapat dilakukan dengan menghitung jumlah keseluruhan pendapatan masyarakat di Indonesia yang berasal dari beberapa faktor produksi yang didapat. Diantaranya adalah pendapatan gaji karyawan atau upah, pendapatan dari usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, pendapatan dari keuntungan yang didapat oleh perusahaan.⁸ Metode pengeluaran dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan keseluruhan nilai-nilai barang yang dihasilkan oleh masyarakat atau sektor perekonomian, baik didalam konsumsi, investasi, dan pembelian pemerintah. Pada saat melakukan perhitungan pengeluaran perlu diperhatikan untuk membedakan antara barang yang jadi dengan barang yang separuh jadi, kegiatan ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam

⁶ Priyono, Teddy Chandra, *Esensi Ekonomi Makro*, (Sidoarjo: Zifatma Publisher, 2016), hlm. 25.

⁷ Agung Andana Yoshanda, *Pendapatan Nasional*, Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, hlm. 5.

⁸ Sugianto, Anggun Putri Romadhina, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Dan Makro*, (Banten: YPSIM, 2020), hlm. 92.

UPAYA PEMERINTAH RI MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA

perhitungan barang dan jasa yang diproduksi.⁹ Metode produksi yaitu menghitung jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekonomi selama satu tahun. Seperti peternakan, perkebunan, dan hasil laut.¹⁰

C. METODE PENELITIAN

Dalam metode pengumpulan data-data penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode perpustakaan (*library research*) dengan mengambil data berupa tulisan dari buku-buku terdahulu atau penulisan-penulisan sebelumnya yang relevan.¹¹

D. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Saat ini BPS (Badan Pusat Statistik) memperlihatkan jumlah angka penduduk di Indonesia mencapai 275,7 juta jiwa pada tahun 2022,¹² dengan angka penduduk yang begitu banyak, pada saat ini Indonesia masih tergolong rendah dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bahkan masih banyak penduduk Indonesia yang berkerja hanya lulusan SD, SMP dan SMK/SMA.¹³ Dari data tersebut belanja pemerintah mejadi salah satu faktor kurangnya sumber daya manusia, sehingga belanja pemerintah menjadi peran yang sangat penting untuk menyediakan fasilitas dan sarana yang ada di masyarakat.¹⁴

Dari pendapat tersebut pendapatan nasional menurun diakibatkan oleh salah satu faktor yaitu sumber daya manusia yang masih rendah, sehingga peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan prekonomian dalam pembangunan dan membangun fasilitas untuk masyarakat.

⁹ Agus Eko Sujianto, Dkk, *Pendapatan Nasional Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Ekspor Bersih*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2012), hlm. 15-16.

¹⁰ Suparmono, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), hlm. 23.

¹¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 30.

¹² <https://www.bps.go.id> Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2022

¹³ <https://m.merdeka.com/> Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2022.

¹⁴ Widya Wulandari, Dkk, *Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Vol. 11, No. 3, 2022. hlm. 541.

UPAYA PEMERINTAH RI MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA

Kinerja pendapatan negara menunjukkan tren positif yang didukung tumbuhnya penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tren positif dipengaruhi oleh empat hal yaitu tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis yang rendah tahun 2021 akibat pemberian insentif fiskal, dan adanya dampak implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Namun tetap harus berhati-hati mengingat kondisi ekonomi global.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk menghasilkan output atau outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian ke arah lebih baik. Melalui kebijakan fiskal 2023, pemerintah akan meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung reformasi fiskal. Reformasi fiskal dilakukan melalui:

1. Mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal,
2. Konsistensi penguatan *spending better* untuk efisiensi dan efektivitas belanja serta
3. Terus melakukan pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

Pemerintah akan memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri, mengakselerasi pembangunan infrastruktur hingga pengembangan ekonomi hijau. Pendapatan negara 2023 ditargetkan meningkat kisaran 11,19%-11,70% dari PDB sedangkan belanja negara mencapai kisaran 13,8%-14,6% dari PDB.¹⁵ Pada saat pandemi pendapatan nasional dapat ditingkatkan melalui 4 hal, yakni sebagai berikut:¹⁶

1. Melakukan kegiatan pembelanjaan pemerintah dengan skala besar.

Pembelanjaan pemerintah terhadap suatu barang dan jasa akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pembelanjaan negara untuk mengembangkan infrastruktur dapat membuat suatu

¹⁵ Sri Mulyani Indrawati, *Penguatan SDM hingga Ekonomi Hijau*, 27 Februari 2023, dikutip dari laman ojk.go.id

¹⁶ Habli Zainal, Dkk, *Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Di Masa Pasca Pandemi*, Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, Edisi II, 2021. hlm. 39.

UPAYA PEMERINTAH RI MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA

kegiatan produksi barang dan jasa semakin lancar.¹⁷ Bahkan dalam undang-undang republik Indonesia tahun 2006 mengatakan belanja pemerintah merupakan jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menggerakkan fungsi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, bahkan fungsi ekonomi, lingkungan hidup, fasilitas umum, kesehatan, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.¹⁸ Dengan demikian pemerintah harus melakukan belanja dalam skala besar, agar para pelaku ekonomi dapat beroperasi kembali dan meningkatkan perekonomiannya.

2. Melakukan pemberian pinjaman terhadap UMKM dengan suku bunga yang rendah.

Pemerintah berperan penting dalam memberikan pinjaman terhadap UMKM, salah satunya pemberian suku bunga yang rendah.¹⁹ Ini memberikan angin segar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan atau memperbanyak produksi barang-barang dan jasa. Sesuai dengan ajaran Islam yang menyebutkan bahwa melakukan pinjaman dengan bunga termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan pada surah Ali Imran ayat 130, dijelaskan jangan memakan riba.²⁰

3. Meletakkan dana negara di dalam suatu lembaga keuangan seperti bank.

Dana yang didapat oleh pemerintah bukan semata-mata dibelanjakan untuk keperluan masyarakat dan kebutuhan negara saja, akan tetapi juga harus dialokasikan atau disimpan ke suatu lembaga keuangan. Agar pemerintah mempunyai simpanan untuk melakukan atau memperbaiki perekonomian masa yang akan datang.²¹

¹⁷ Muhammad Sadil, Dkk, *Analisi Pengaruh Belanja Negara Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal of Accounting Finance, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 32.

¹⁸ Dalam UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016, pasal 1, Tentang Pendapatan Dan Belanja Negara.

¹⁹ Didalam <https://ekonomi.bisnis.com>. Diakses pada tanggal 10 desember 2022

²⁰ Didalam Al-Quran

²¹ Habli Zainal, Dkk, *Op Cit*, hlm. 41.

UPAYA PEMERINTAH RI MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA

4. Melaksanakan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan suatu peran pemerintah yang harus dijalankan, karena pembangunan nasional bertujuan untuk memberikan atau mengabdikan masyarakat adil dan makmur, pada dasarnya seluruh masyarakat dapat merasakan kesejahteraan, salah satunya dalam pembangunan ekonomi yang berperan sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan nasional.²²

Untuk pasca pandemi kondisi kembali normal, pemerintah terus mendorong optimalisasi pendapatan negara, antar lain mendorong agar target perpajakan dapat tercapai dan rasio perpajakan dapat ditingkatkan. Dilansir dari laman resmi kemenkeu, Rabu, 1 Juni 2022 bahwa optimalisasi pendapatan negara dilakukan melalui terobosan kebijakan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dunia usaha. Berbagai terobosan kebijakan seperti melanjutkan penguatan reformasi, baik secara administrasi maupun regulasi, yakni:²³

1. Dari sisi administrasi, perbaikan diarahkan untuk mendorong peningkatan pengawasan kegiatan penerimaan pajak dengan berbasis pada data, teknologi, dan analisis risiko yang lebih dalam. Penguatan administrasi ditempuh melalui lima pilar utama, mulai organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi.
2. Penguatan dari sisi regulasi ditempuh melalui penerapan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan secara efisien dan efektif, termasuk mempercepat penerbitan berbagai peraturan turunannya.
3. Terobosan kebijakan pajak, berbagai inovasi dan kebijakan baru untuk meningkatkan PNBPN di antaranya melalui:
 - a. Penyempurnaan regulasi
 - b. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan aset negara
 - c. Peningkatan nilai tambah ekonomis

²² Didalam <https://jdih.kemengkeu.go.id> Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2022

²³ Eko Nordiansyah, "Begini Cara Pemerintah Dorong Peningkatan Pendapatan Negara 2023" medcom.id, Rabu 01 Juni 2022, 11:24

UPAYA PEMERINTAH RI MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA

- d. Penguatan tata kelola
 - e. Peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik serta
 - f. Optimalisasi dividen BUMN terutama BUMN yang menerima PMN
4. Beberapa terobosan dalam APBN 2023 di antaranya adalah
- a. Melanjutkan upaya perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
 - b. Mempercepat implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP.
 - c. Menyediakan insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan sektor industri tertentu sekaligus menarik investasi baru.
 - d. Melakukan percepatan implementasi *core tax system* dan
 - e. Meningkatkan aktivitas digital forensic untuk mendukung penegakan hukum pajak.

E. KESIMPULAN

Pemerintah terus mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung reformasi fiskal. Juga mendorong optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, *Analisis Pendapatan, Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Nasional*, Jurnal Plano Madani Vol. I, No. 1, 2022.
- Sri Wahyuni, Devi Andriyani, *Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Aceh*, Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Vol. 5, No. 1, 2022
- Hikmah Nuraini, dkk, *Analisis Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan pada Lima Provinsi Tertimpang di Indonesia*, Jurnal Manajemen Akuntansi. Vol. 18, No. 1, 2022.

UPAYA PEMERINTAH RI MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA

Di dalam <https://nasional.kontan.co.id> diakses pada tanggal 7 Desember 2022.

Di dalam <https://kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 7 Desember 2022.

Priyono, Teddy Chandra, *Esensi Ekonomi Makro*, (Sidoarjo: Zifatma Publisher, 2016).

Agung Andana Yoshanda, *Pendapatan Nasional*, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Sugianto, Anggun Putri Romadhina, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro*, (Banten: YPSIM, 2020).

Agus Eko Sujianto, Dkk, *Pendapatan Nasional Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Ekspor Bersih*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2012).

Suparmono, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018).

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021)

<https://www.bps.go.id/> diakses pada tanggal 7 Desember 2022

<https://m.merdeka.com/> diakses pada tanggal 7 Desember 2022.

Widya Wulandari, Dkk, *Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 11, No. 3, 2022.

Habli Zainal, Dkk, *Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional di Masa Pasca Pandemi*, Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, Edisi II, 2021.

Muhammad Sadil, Dkk, *Analisi Pengaruh Belanja Negara dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal of Accounting Finance, Vol. 3, No. 2, 2022.

Dalam UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016, pasal 1, Tentang Pendapatan dan Belanja Negara.

Didalam <https://ekonomi.bisnis.com> diakses pada tanggal 10 Desember 2022

Didalam Al-Quran, surat Ali-Imran

Didalam <https://jdih.kemengkeu.go.id> diakses pada tanggal 10 Desember 2022